

**PERANAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI
MASYARAKAT DI BIDANG PERTANIAN
(Studi: Desa Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya
Kabupaten Bintan Tahun 2014)**

NASKAH PUBLIKASI



MUHAMMAD INDRA WIJAYA

NIM. 110565201151

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG**

2017

SURAT PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa yang disebut dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD INDRA WIJAYA

NIM : 110565201151

Jurusan/ Prodi : Ilmu Pemerintahan

Alamat : JL. Kapitan No. 27 Kelurahan Sei Jang Kecamatan Bukit Bestari

Nomor Telp : 081276402254

Email : indrawijayaumrah0@gmail.com

Judul Naskah : Peranan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Bidang Pertanian (Studi: Desa Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan Tahun 2014)

Menyatakan bahwa judul tersebut sudah sesuai dengan aturan tata tulis naskah ilmiah dan untuk dapat diterbitkan.

Tanjungpinang, 31 Juli 2017

Yang menyatakan,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Imam Yudhi Prastya, S.IP., MPA
_NIP. 198307022014041002

Nazaki, M.Si
NIP.199311032012121001

**Peranan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Bidang
Pertanian (Studi: Desa Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan
Tahun 2014)**

**MUHAMMAD INDRA WIJAYA
IMAM YUDHI PRASTYA
NAZAKI**

ABSTRAK

Pemberdayaan ekonomi rakyat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah usaha pemerintah Kabupaten Bintan dalam rangka menjadikan ekonomi masyarakat Desa Toapaya Selatan di Bidang Pertanian khususnya pertanian penghasil sayur-sayuran yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakan peran pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Bidang Pertanian di Desa Toapaya Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif,

Hasil penelitian menunjukkan kurangnya peran Pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi dikarenakan panen petani menunjukkan tidak mencukupi bagi masyarakat untuk meningkatkan kebutuhan ekonomi yang pada akhirnya masyarakat lebih memilih bertani sambil bekerja sebagai buruh. Kurangnya kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap petani dan juga tidak meratanya kegiatan penyuluhan tersebut yang mana sebaiknya ada kerjasama yang baik dari pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam mengadakan penyuluhan. Pemerintah tidak membantu petani untuk memasarkan hasil panennya, sehingga petani harus menjual sendiri hasil panennya dengan harga yang jauh lebih murah. Kurangnya bantuan-bantuan pemerintah seperti modal dan peralatan pertanian. Sebagai dampak dari kurangnya bantuan dari pemerintah tersebut adalah terbatasnya lahan pertanian dan tanaman untuk ditanam. Selain itu juga pendapatan yang selalu mengalami naik dan turun karena para petani harus menyediakan modal sendiri untuk kegiatan pertaniannya

Kata kunci: peranan, pemberdayaan, pertanian

**THE ROLE OF GOVERNMENT IN ECONOMIC COMMUNITY
EMPOWERMENT IN AGRUCULTURE (Study: South Topaya, Toapaya**

Bintan 2014)

**MUHAMMAD INDRA WIJAYA
IMAM YUDHI PRASTYA
NAZAKI**

ABSTRACT

The economic empowerment of the people in question in this research is the Bintan regency government efforts in order to make the local economy Toapaya Village South in Agriculture horseradish strong, large, modern, and highly competitive market mechanism.

The purpose of this study was to find out how is the government's role in economic empowerment in Agriculture in the village of South Toapaya. The method used in this study is qualitative.

The results showed a lack of Government role in economic empowerment because farmers harvest showed insufficient for the community to improve the economic needs of the community in the end prefer farmed while working as laborer. Lack of outreach activities undertaken by the government to farmers and extension activities such as never which should be good cooperation from local governments and village governments in providing extension. The government does not help farmers to market their crops, so farmers have to sell themselves their crops at a price much cheaper. As a result a lack of support from the government is limited farmland and crops to be planted. But is also the revenue which always must provide their own capital to agricultural activities.

Keywords: *role, empowerment, agriculture.*

A. PENDAHULUAN

Pemerataan dalam mensejahteraan sejumlah penduduk yang berada di desa bahkan di kota semakin lama semakin meningkat, hal ini menjadi pertimbangan utama bagi pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, sehingga arah perekonomian Indonesia dibangun untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, desa mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul dan adat istiadatnya dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, membuat kebijakan tentang desa dalam memberi pelayanan, peningkatan peran dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan kepada masyarakat. Dalam konteks otonomi daerah dan desa harus mempunyai kewenangan untuk mengurus urusan-urusan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar dan kebutuhan pengembangan usaha masyarakat.

Kelompok kebutuhan dasar adalah hampir sama diseluruh Indonesia hanya suatu tingkatan yang dijadikan sebagai tolak ukur kualitas seseorang pada bidang tertentu saja yang berbeda. Sedangkan kebutuhan pengembangan usaha penduduk sangat erat kaitannya dengan karakter daerah, pola pemanfaatan lahan dan mata pencaharian penduduk yang salah satunya adalah pertanian.

Arah pemberdayaan terhadap masyarakat, secara umum berpangkal pada dua sasaran utama yaitu sandang dan pangan, serta mempererat posisi masyarakat dalam struktur kekuasaan. Untuk sampai kepada sasaran tersebut, maka proses pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu inisial, partisipatoris, dan emansipatori. Inisial diartikan sebagai dari pemerintah, oleh pemerintah dan untuk rakyat. Partisipatori diartikan dari pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah bersama masyarakat, untuk rakyat. Sedangkan emansipatori diartikan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan didukung oleh pemerintah bersama rakyat. Dengan demikian peran serta dan fungsi pemerintah dalam mensejahterakan dan memandirikan masyarakat sangat diperlukan.

Menurut Kuznets dalam Tulus Tambunan (2003:9) Sektor pertanian memiliki empat kontribusi penting bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional, diantaranya :

1. Kontribusi produk, yaitu penyediaan makanan bagi masyarakat, penyediaan bahan baku bagi beberapa industry makanan, minuman, dan industry tekstil.
2. Kontribusi pasar, yaitu terbentuknya pasar untuk beberapa bahan industri dan makanan.
3. Kontribusi faktor produksi, yaitu menyebabkan turtunnya peranan pertanian di pembangunan ekonomi

yang akan berpengaruh terhadap transfer surplus modal dari sector lain.

4. Kontribusi devisa, yaitu ekspor produk pertanian dan produk pertanian yang menggantikan produk impor akan menjadi sumber penting bagi surplus Neraca Perdagangan.

Potensi sumberdaya alam didesa Toapaya Selatan umumnya diarahkan pada sector pertanian karena memiliki potensi pertanian yang cukup baik. Namun dari hasil usaha tani terutama produksi hasil pertanian belum banyak memberikan manfaat bagi peningkatan taraf hidup masyarakat petani. Faktor-faktor yang turut mempengaruhi aktivitas usaha tani tersebut adalah modal, pasar, kelembagaan, dan aspek pendidikan. Usaha pemberdayaan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat petani sampai saat ini belum banyak memberikan manfaat terutama dalam meningkatkan produksi dan pendapatan dari hasil panen oleh petani.

Konsep yang sering dimunculkan dalam proses pemberdayaan adalah konsep kemandirian dimana tujuannya yang dirancang secara sistematis agar individu maupun para petani menjadi subjek dari pembangunan. Kegagalan berbagai tujuan pembangunan perdesaan adalah disebabkan antara lain karena penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program-program pemberdayaan yang tidak melibatkan masyarakat. Proses pembangunan lebih mengedepankan paradigma politik

sentralistis dan dominannya peranan negara pada arus utama kehidupan bermasyarakat.

Pemberdayaan masyarakat yang perlu dilakukan adalah dengan mendorong masyarakat untuk menyadari bahwa sektor pertanian adalah sektor kebutuhan yang paling vital bagi masyarakat. Semakin hari jumlah masyarakat yang masih memilih bertani semakin kecil. Masyarakat saat ini lebih tertarik untuk bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan dan di instansi-instansi pemerintah serta swasta lainnya dan saat ini sektor pertanian dianggap tidak menjanjikan lagi.

Desa Toapaya Selatan yang terbentuk dari pemekaran Desa Toapaya pada tahun 2006, merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan hasil Registrasi yang tertera dalam Profil Desa Toapaya (2014), penduduk Desa Toapaya Selatan berjumlah 4.986 jiwa yang terbagi dalam 1.335 Kepala Keluarga diantaranya bermata pencaharian sebagai petani yang merupakan sektor pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura yang kemudian di bentuk menjadi 6 kelompok tani sejak tahun 2009 yang memiliki potensi pertanian yang tinggi.

Tujuan utama pembentukan dan penguatan pertanian dibentuk untuk memperkuat kelembagaan petani di Desa Toapaya Selatan, sehingga pembinaan

Yang tercantum pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 273/Kpts/Ot.160/4/ 2007 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok tani dan Gabungan Kelompok tani serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani di Desa Toapaya Selatan akan terfokus kesasaran yang jelas.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka adapun gejala penelitian adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan yang terjadi saat ini bagi petani di Desa Toapaya Selatan adalah adanya pandangan yang berbeda yang dikarenakan pengaruh ekonomi dan pendidikan dari masyarakat, sehingga petani saat ini susah mengikuti perkembangan zaman dengan segala peralatan yang lebih canggih dan prosedur-prosedur bercocok tanam yang lebih efisien. Canggihnya peralatan pertanian yang tidak didukung dengan factor ekonomi yang dimiliki petani menjadi salah satu kendala bagi petani untuk berkembang.
2. Masyarakat di Desa Toapaya Selatan tidak siap dengan segala tuntutan perkembangan zaman, dikarenakan pencapaian hasil panen mereka tidak sesuai dengan yang diharapkan, bahkan sering kali terjadi gagal panen,

hal ini dikarenakan terbatasnya kesempatan mereka untuk bisa mengakses informasi tentang pertanian seiring kemajuan teknologi di sektor pertanian.

3. Harga jual hasil pertanian yang rendah serta sulitnya memasarkan hasil pertanian mengakibatkan petani tidak bisa memenuhi kekurangan biaya produksi pertanian dan biaya kebutuhan hidup karena adanya kerugian.

Pemberdayaan ekonomi rakyat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah usaha pemerintah Kabupaten Bintan dalam rangka menjadikan ekonomi masyarakat desa Toapaya Selatan Bidang Pertanian khususnya pertanian penghasil sayur-sayuran yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat saat ini adalah kendala struktural, maka pemberdayaan harus dilakukan melalui perubahan struktural khususnya pada bidang pertanian. Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian.

Peranan Pemerintah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Bidang Pertanian di Desa Toapaya Selatan sangat perlu dikaji khususnya dari segi perubahan struktural kelompok tani yang ada

di Desa Toapaya Selatan. Pentingnya ini dilakukan agar kita semua dapat melihat sejauh mana pemerintah berperan dalam pemberdayaan dibidang pertanian baik itu dari segi peningkatan kualitas mutu hasil tani dan juga kualitas kerja petani dan pada akhirnya status ekonomi masyarakat desa toapaya atas kegiatan pertaniannya.

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari Purwanti Wismasari (2012) dengan judul Pemberdayaan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2014 studi di Kelurahan Sungai Lekop Kecamatan Bintan Timur. Hasil penelitian menunjukkan telah terpenuhinya pangan masyarakat kelompok, telah terpenuhi kebutuhan keluarga (pendidikan anak), masyarakat kelompok memiliki penghasilan tambahan serta tabungan dari kegiatan Gapoktan dan sebagian besar dari masyarakat kelompok telah memiliki kendaraan dengan hasil pertanian yang tidak memiliki sistem bagi hasil atau hasil dari usaha tani hanya untuk individu bukan kelompok (kondisi fisik). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini mengkaji lebih mendalam tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat di bidang pertanian di Desa Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan.

Berdasarkan fakta diatas maka peneliti tertarik untuk membahas secara mendalam sesuai permasalahan yang

diangkat dengan judul **“Peranan Pemerintah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Bidang Pertanian (Studi: Desa Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan Tahun 2014)”**.

B. LANDASAN TEORI

1. Peranan

Menurut Merton dalam Raho (2007:67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran. Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.

Peranan merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.(Soekanto, 2009:212-213).

Levinson dalam Soekanto (2009:213) mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan menurut Edi Suharto (2004:1) merupakan pekerjaan sosial dan kegiatan kemanusiaan yang sejak dahulu telah memiliki perhatian yang mendalam pada keadaan masyarakat miskin. Prinsip-prinsip pekerjaan sosial, seperti 'menolong orang agar mampu menolong dirinya sendiri' (*to help people to help themselves*), 'penentuan nasib sendiri' (*self determination*), 'bekerja dengan masyarakat' (*working with people* dan bukan 'bekerja untuk masyarakat' atau *working for people*), pemberdayaan telah menunjukkan itikadnya dalam sejarah pekerjaan sosial untuk menjauh masyarakat miskin dari ketidakberdayaannya selama ini.

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata 'power' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep

mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah.

Edi Suharto (2002:6) mengungkapkan definisi pemberdayaan lebih luas yaitu Pemberdayaan dapat dinyatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses

Pengertian pemberdayaan menurut Mc Ardle sebagaimana yang dikutip Harry Hikmat (2010:3) mengartikan: pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan “keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, ketrampilan dan sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan eksternal. Namun demikian, McArdle mengimplikasikan hal tersebut bukan untuk mencapai tujuan, melainkan makna pentingnya proses dalam pengambilan keputusan

Pemberdayaan sosial-ekonomi ialah: usaha memberi pengetahuan, keterampilan serta menumbuhkan kepercayaan diri serta kemauan kuat dalam diri seseorang sehingga mampu membangun suatu kehidupan sosial-ekonomi yang lebih baik dengan kekuatan sendiri. Singkatnya, pemberdayaan sosial-ekonomi bermaksud menciptakan manusia swadaya dalam kegiatan sosial-ekonomi. Pemberdayaan sosial-ekonomi ini pada intinya dapat diupayakan melalui berbagai kegiatan antara lain pelatihan, pendampingan, penyuluhan, pendidikan dan keterlibatan berorganisasi demi menumbuhkan dan memperkuat

motivasi hidup dan usaha, serta pengembangan pengetahuan dan keterampilan hidup dan kerja

Pemberdayaan adalah suatu aktifitas refleksif, suatu proses yang mampu dinisiasikan dan dipertahankan hanya oleh agen atau subjek yang mencari kekuatan atau penentuan diri sendiri (self-determination). Sementara proses lainnya hanya dengan memberikan iklim, hubungan, sumber-sumber dan alat-alat prosedural yang melaluinya masyarakat dapat meningkatkan kehidupannya. Pemberdayaan merupakan sistem yang berinteraksi dengan lingkungan sosial dan fisik bukan merupakan upaya pemaksaan kehendak, proses yang dipaksakan, kegiatan untuk kepentingan pemrakarsa dari luar, keterlibatan dalam kegiatan tertentu saja, dan makna-makna lain yang tidak sesuai dengan pendelegasian kekuasaan atau kekuatan sesuai potensi yang dimiliki masyarakat

Istilah keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dengan individu-individu lainnya dalam masyarakat untuk membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Memberdayakan masyarakat adalah upaya memperkuat unsur-unsur keberdayaan itu untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi yang tidak mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan

keterbelakangan, atau proses memampukan dan memandirikan masyarakat (Anwar, 2007:1)

Menurut Edi Suharto (2005:60) tujuan dari pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya

Menurut Anwar (2007:3) Human capital theory, menekankan bahwa manusia merupakan sumber daya utama, berperan sebagai subjek baik dalam upaya peningkatan taraf hidup dirinya maupun dalam melestarikan dan memanfaatkan lingkungannya. Menurut teori ini, konsep-konsep pendidikan harus didasarkan pada anggapan bahwa modal yang dimiliki manusia itu terdapat pada dirinya sendiri, berupa sikap, pengetahuan, ketrampilan dan aspirasi.

Perekonomian adalah merupakan modal dasar pembangunan, untuk itu pembangunan dipedesaan adalah merupakan satu strategi pembangunan yang dirangsang bagi peningkatan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, dengan

adanya home industry tersebut diharapkan membawa perubahan terhadap kondisi perekonomian masyarakat Mojosantren, dengan demikian upaya yang dilakukan oleh masyarakat home industry tersebut adalah peningkatan kekreatifitasan dalam kegiatan perekonomian yang ada dimasyarakat melalui pemberian ketrampilan usaha dagang, pemberian pinjaman modal usaha dengan bunga ringan, pemasaran hasil usaha, dan bagaimana berpartisipasi dalam kehidupan politik yang ada dimasyarakat.

Partisipasi merupakan komponen penting dalam pembangkitan kemandirian dan proses pemberdayaan. Sebaiknya, orang-orang harus terlibat dalam proses tersebut sehingga mereka dapat lebih memperhatikan hidupnya untuk memperoleh rasa percaya diri, memiliki harga diri dan pengetahuan untuk mengembangkan keahlian baru. Prosesnya dilakukan secara kumulatif sehingga semakin banyak ketrampilan yang dimiliki seseorang, semakin baik kemampuan berpartisipasinya.

Menurut Sumodiningrat (2003 : 56), konsep pemberdayaan secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah bahwa perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk

- menjalankan roda perekonomian mereka sendiri.
- Pengertian rakyat adalah semua warga negara.
- b. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.
- c. Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian. Langkah-langkah proses perubahan struktur, meliputi: (1) pengalokasian sumber pemberdayaan sumberdaya; (2) penguatan kelembagaan; (3) penguasaan teknologi; dan (4) pemberdayaan sumberdaya manusia.
- d. Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.
- e. Kebijakannya dalam pembedayaan ekonomi rakyat adalah: (1) pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal); (2) memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekadar price taker; (3) pelayanan pendidikan dan kesehatan; (4) penguatan industri kecil; (5) mendorong munculnya wirausaha baru; dan (6) pemerataan spasial.
- f. Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup: (1) peningkatan akses bantuan modal usaha; (2) peningkatan akses pengembangan SDM; dan (3) peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal.
- Konsep pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu konsep utama dalam ilmu kesejahteraan sosial pada era 1990-an hingga saat ini. Sering kali dikaitkan dengan intervensi komunitas. Konsep pemberdayaan masyarakat ini mendapatkan penekanan yang lebih khusus. Terutama pada model intervensi pengembangan masyarakat. Sebagai suatu konsep pemberdayaan masyarakat mempunyai berbagai definisi. Salah satunya adalah Paine sebagaimana yang dikutip oleh Isbandi Rukminto Adi mengemukakan bahwa suatu pemberdayaan, pada intinya, ditujukan guna membantu klien

memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan (Isbandi Rukminto Adi, 2013:206). Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya.

Dengan demikian maka kesejahteraan sosial akan muncul sebagai akibat pemberdayaan. Kesejahteraan sosial dalam artian yang sangat luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Menurut Midgley sebagaimana yang dikutip oleh Isbandi Rukminto Adi (2013:35) mengemukakan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalkan

Menurut Kartasasmita strategi pengembangan ekonomi masyarakat yang lebih kuat perlu diarahkan untuk mendorong percepatan struktural (*structural transformation*) untuk memperkuat kedudukan dan peran ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional. Transformasi struktural ini meliputi proses perubahan ekonomi tradisional menjadi ekonomi

modern, ekonomi lemah menjadi ekonomi yang tangguh, ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan kepada kemandirian. Di bawah ini adalah strategi pengembangan ekonomi masyarakat menurut Ginanjar Kartasasmita diantaranya adalah:

- a. *Pertama*, peningkatan akses kepada asset produksi (*productive assets*). Bagi masyarakat petani yang masih dominan dalam ekonomi rakyat, modal produktif yang utama adalah tanah. Oleh karena itu, kebijaksanaan kepemilikan, penguasaan dan penggunaan tanah sungguh penting dalam melindungi dan memajukan ekonomi rakyat ini. Untuk bisa melakukan hal tersebut harus ada alternatif, antara lain berupa pemanfaatan lahan secara lebih efisien, dan penciptaan lapangan kerja pedesaan. Dalam rangka ini upaya untuk memelihara dan meningkatkan produktivitas (dengan demikian nilai aset) lahan harus ditingkatkan, misalnya dengan pengairan, pemupukan, diversifikasi usaha tani atau pemilihan jenis budi daya (untuk memperoleh nilai komersial yang tinggi). Salah satu pilihan diversifikasi usaha tani adalah ternak karena potensi pengembangannya cukup besar, dan tidak terlalu banyak keahlian dalam menanganinya, dengan penyuluhan yang sederhana sudah akan menumbuhkan kegiatan

yang secara nyata menghasilkan tambahan pendapatan. Selain itu, hal penting lainnya adalah akses terhadap dana dengan tersedianya kredit yang dapat menciptakan pembentukan modal bagi usaha rakyat. Tidak kurang penting juga adalah akses kepada teknologi sederhana yang penerapannya dapat meningkatkan produktivitas atau keterjaminan produksi dan segera memberi hasil berupa peningkatan pendapatan.

- b. *Kedua*, memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat. Sebagai produsen dan penjual, posisi dan kekuatan rakyat dalam perekonomian sangatlah lemah. Hal seperti hendaknya diperbaiki, pertama-tama rakyat harus dibantu dengan sarana prasarana perhubungan yang akan memperlancar pemasaran produknya. Selain itu, rakyat harus pula diorganisasikan untuk sama-sama memasarkan hasil produksinya sehingga sedikit banyak memperkuat posisinya. Tugas pemerintah pun sangat penting dalam pengelolaan ekonomi makro yang menunjang bagi ekonomi rakyat. Stabilitas ekonomi sangat penting bagi ekonomi rakyat karena yang pertama-tama dirugikan jika terjadi gejolak adalah rakyat.
- c. *Ketiga*, meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber

daya manusia. Pendidikan merupakan strategi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka pendidikan harus makin terkait dengan kebutuhan pasar kerja. Disamping itu, pelayanan kesehatan juga harus makin ditingkatkan secara merata disertai dengan upaya peningkatan gizi, hal tersebut berperan besar dalam menentukan produktivitasnya.

- d. *Keempat*, kebijaksanaan pengembangan industri rakyat yang mengarah pada penguatan industri rakyat. Artinya proses industrialisasi harus mengarah ke perdesaan dengan memanfaatkan potensi setempat. Industri perdesaan adalah industri kecil dan sedang, yang memanfaatkan sumber daya alam setempat dengan cara yang lestari, memakai tenaga kerja setempat, menggunakan lembaga-lembaga sosial dan ekonomi yang ada, dan memperkuat ekonomi rakyat tersebut.
- e. *Kelima*, kebijakan ketenagakerjaan yang merangsang tumbuhnya tenaga kerja mandiri sebagai wirausaha kecil dan menengah yang kuat dan saling menunjang. Maka kebijakan ketenagakerjaan perlu menyediakan pelatihan keterampilan teknis, manajemen dan perdagangan, termasuk pengetahuan mengenai pasar serta cara untuk memperoleh

pendanaan. Selain itu, kebijakan tentang upah sangatlah penting. Upah yang terlalu rendah tidak merangsang produktivitas. Dengan demikian, penetapan upah yang wajar, adil, dan secara ekonomis dibenarkan, sangatlah diperlukan dan strategis pula sifatnya, dalam rangka penanggulangan kemiskinan yang erat kaitannya dengan pengembangan ekonomi rakyat.

- f. *Keenam*, pemerataan pembangunan antar daerah, yaitu memberikan kesempatan yang lebih besar pada ekonomi rakyat di daerah yang terbelakang untuk berkembang. Oleh karena itu perlu adanya pendekatan yang sesuai dengan kondisi setempat. Selain itu, pemerintah daerah perlu diberi tanggung jawab yang lebih besar dalam membangun daerahnya dan memperkuat ekonomi rakyatnya. Penguatan ini antara lain dengan memberikan kepercayaan yang lebih besar dalam mengelola dana pembangunan.

- g. *Ketujuh*, adanya perangkat peraturan perundang-undangan yang memadai untuk melindungi dan mendukung pengembangan ekonomi rakyat yang ditujukan khusus untuk kepentingan rakyat kecil.

Pengertian pengembangan menurut J.S Badudu yang dikutip dalam Kamus

Umum Bahasa Indonesia adalah cara atau hasil kerja mengembangkan. Sedangkan mengembangkan berarti membuka, memajukan, menjadikan mau dan bertambah baik.

Pelaksanaan pengembangan masyarakat di desa Toapaya Selatan harus didukung oleh sarana dan prasarana yang cukup agar berjalan secara optimal. Tentunya sumber daya manusia yang paling menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan Program pengembangan masyarakat tani sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Aparatur Pemerintah dalam menjalankan pelaksanaan program pengembangan masyarakat tani harus sesuai dengan pedoman yang berlaku berdasarkan peraturan menteri pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 Tentang Pedoman Pembinaan kelompok tani dan Gabungan kelompok tani. Dengan adanya pedoman yang jelas tentang pelaksanaan Program tersebut maka aparaturnya Pemerintah Desa Toapaya Selatan tentunya dapat melaksanakan programnya dengan optimal.

Secara konseptual, menurut Herbert J. Rubin (Nyoman, 2005 : 94-96) ada lima prinsip dasar dari konsep pemberdayaan masyarakat. *Pertama*, untuk mempertahankan eksistensinya, pemberdayaan masyarakat memerlukan *break-even* dalam setiap kegiatan yang dikelola. *Kedua*, konsep pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan partisipasi

masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan yang dilakukan. *Ketiga*, dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, antara kegiatan pelatihan dan pembangunan fisik (termasuk di dalamnya kegiatan pengembangan usaha), merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. *Keempat*, dalam mengimplementasikan konsep pemberdayaan harus dapat memaksimalkan sumber daya (*resources*), khususnya dalam hal dana, baik yang berasal dari pemerintah, swasta, maupun dari sumber-sumber lainnya, seperti donasi dan sponsor pembangunan social. *Kelima*, kegiatan pemberdayaan masyarakat harus lebih memfungsikan diri sebagai 'katalis' yang menghubungkan antara kepentingan pemerintah yang bersifat makro.

Secara organisasi bahwa kontrol proses pengembangan pertanian dilakukan oleh sebuah organisasi desa yang berada di tingkat desa dengan penanggung jawab umum Kepala Desa. Sedangkan pengelola kegiatan harian, bertugas melaksanakan kegiatan lapangan. Hal tersebut supaya tercapainya program tentang Peningkatan Produksi Produktifitas Tanaman, Mutu Tanaman, Mutu Produk Tanaman Holtikultura dengan tujuan Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Holtikultura yang dilakukan oleh pemerintah .

Selain dari pada itu kepala desa sangat berperan penting pada program

pengembangan pertanian, yang sebagaimana mestinya tertulis pada pasal 1 ayat 9 yang berbunyi "Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi".

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dimana penulis memaparkan data yang diperoleh dari hasil penelitian berkaitan dengan peranan pemerintah di bidang pertanian di Desa Toapaya Selatan. Menurut Sarwono (2006: 193) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif sebagai suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan permasalahan yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia. Hal ini sejalan dengan pendapat Umar (2002: 38) tujuan penelitian deskriptif ini adalah memaparkan atau mendeskripsikan hal-hal yang ditanyakan dalam riset seperti : siapa, yang mana, kapan, dimana dan mengapa. Permasalahan deskriptif adalah suatu permasalahan yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri baik hanya pada suatu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri).

Penelitian ini berlokasi di Desa Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan. Adapun alasan tertarik memilih lokasi ini karena Desa Toapaya

Selatan merupakan Desa yang sangat strategis secara geografis, karena memiliki luas tanah kurang lebih 9.180 Km² dan memiliki potensi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam yang mampu membuka kesempatan dan peluang untuk mengembangkan usaha salah satunya dalam sentral pertanian. Tetapi dengan begitu pesatnya, tetap saja menyisihkan efek yang tidak bisa di anggap remeh, dan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa perlu adanya perhatian dan pengawasan dari Dinas yang berkompeten untuk meningkatkan kualitas pendapatan dari hasil panen dalam pengembangan lahan pertanian. Disamping itu alasan utama pemilihan lokasi penelitian di Desa Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan adalah dikarenakan Desa Toapaya Selatan adalah pemilik lahan pertanian terluas di Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan sehingga informan dan data yang dibutuhkan akan lebih mudah didapat serta permasalahan perubahan struktural kelompok tani yang ada di Desa Toapaya Selatan juga dapat digambarkan dengan jelas permasalahannya.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk memperoleh data berkaitan

dengan pelaksanaan Program Agropolitan di Desa Toapaya Selatan sebagai berikut :

- a. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung kepada petugas Pelaksa program Pengembangan Pertanian di Desa Toapaya Selatan.

Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara dengan bentuk tidak berstruktur berupa butir-butir pertanyaan.

- b. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan secara langsung terhadap pelaksanaan Program Pengembangan Pertanian di Desa Toapaya Selatan. Alat bantu yang digunakan daftar checklist, catatan bulanan.
- c. Dokumentasi, yaitu sebagai teknik pengumpulan data penunjang yang diperoleh dari foto maupun gambar yang berkaitan dengan penelitian.

Menurut Patilima (2007 : 88) menyebutkan bahwa pada analisa data kualitatif, peneliti membangun kata-kata dari hasil wawancara atau pengamatan terhadap data yang dibutuhkan untuk dideskripsikan dan dirangkum. Setelah memperoleh berbagai data dalam penelitian, maka selanjutnya dilakukan analisis data temuan lapangan. Analisis data merupakan kegiatan sistematis dengan mencari dan mengatur hasil temuan di lapangan untuk mendapatkan pemahaman atas hasil temuan. Analisis data dalam penelitian ini mempunyai beberapa proses yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan:

1. Reduksi data, yaitu memilih dan memilah data hasil temuan lapangan dan memusatkan perhatian pada penyederhanaan atau abstraksi data. Dalam melakukan reduksi data,

peneliti mengkategorikan data ke dalam beberapa bagian yakni pemberdayaan ekonomi masyarakat bidang pertanian, respon masyarakat, serta dinamika peran pemerintah. Peneliti memilih dan memilah data-data yang relevan dengan tema penelitian.

2. Penyajian data, yaitu deskripsi tentang informasi atau data yang terkumpul dari lapangan, penyajian data dalam penelitian kualitatif umumnya bersifat naratif. Peneliti melakukan penyajian data dalam bentuk laporan narasi dan tabel berdasarkan data-data yang sudah direduksi.

Penarikan kesimpulan, yaitu peneliti menyimpulkan hasil penelitian dari apa yang didapat di lapangan serta dari analisis atau deskripsi yang dilakukan terhadap data.

D. PEMBAHASAN

Salah satu program pemerintah untuk masyarakat Desa adalah program pemberdayaan masyarakat dalam upaya mempercepat perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. Masyarakat desa dapat mempergunakan bantuan dari pemerintah sebagai hibah untuk mengelola usaha taninya melalui GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) meningkatkan sarana/prasarana penunjang pertanian di Desa Toapaya Selatan, pinjaman bagi kelompok ekonomi untuk modal usaha bergulir, atau kegiatan sosial lainnya. Setiap penyaluran bantuan

yang turun ke masyarakat melalui GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) harus sesuai dengan dokumen yang dikirimkan ke Dinas Pertanian Kabupaten Bintan agar memudahkan penelusuran. Warga desa mendapatkan peningkatan kapasitas dalam pembukuan, manajemen data, pengarsipan dokumen dan pengelolaan uang dana secara umum, serta peningkatan kapasitas lainnya terkait upaya pembangunan ekonomi masyarakat dibidang pertanian.

Salah satu tujuan pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah untuk menunjang kebutuhan yang diperlukan masyarakat, yang dilakukan dengan cara memberikan bantuan kepada petani yang tidak mampu untuk dijadikan modal usaha dalam bertani. Yang mana bantuan permodalan tersebut sebelumnya diserahkan ke Gapoktan sebagai wadah penyalur bantuan pemerintah. Bantuan-bantuan ini perlu diberikan mengingat masyarakat desa toapaya memiliki potensi pertanian dan lahan pertanian yang sangat mendukung untuk bercocok tanam, hanya saja hampir rata-rata petani kekurangan modal usaha untuk mengembangkan usaha taninya.

Upaya pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat sudah menjadi program Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bintan yang ada didalam “Anggaran kegiatan Pengendalian Hama dan Penyakit Holtikultura” dalam “Program Peningkatan Produktifitas Tanaman, Mutu Tanaman, Mutu Produk Tanaman

Holtikultura. Bantuan tersebut berupa pupuk, obat-obatan dan pestisida”.

Sebagaimana permasalahan penelitian yaitu bagaimana peran pemerintah desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat bidang pertanian di Desa Toapaya Selatan Kabupaten Bintan, maka deskripsi hasil penelitian ini akan dibahas meliputi peran pemerintah daerah ekonomi masyarakat bidang pertanian dan wujud pemberdayaan yang telah dirasakan oleh Desa Toapaya Selatan Kabupaten Bintan:

1. Meningkatkan pendapatan yang dilakukan oleh petani dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia

Pemberian bantuan-bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi petani di Desa Toapaya Selatan khususnya dalam peningkatan hasil panen petani karena dengan keterbatasan yang dimiliki petani seperti kurangnya peralatan kerja, kurangnya modal untuk membeli pupuk dan bibit tanaman, kurangnya pemahaman petani terhadap teknologi-teknologi baru yang bisa mempermudah dan mempercepat petani dalam mencapai hasil panen yang lebih maksimal menjadikan petani terkadang tidak mencapai target hasil pertanian yang diharapkan.

Dengan adanya bantuan-bantuan pemerintah yang meskipun tidak secara rutin diberikan, namun bagi petani bantuan tersebut memberikan manfaat yang besar

bagi kemajuan usaha taninya. Salah satu bantuan pemerintah adalah permodalan yang dapat diperoleh melalui Gapoktan. Bantuan pemerintah ini jelas sangat bermanfaat bagi petani dalam hal peningkatan pendapatan dan hasil panen. Karena dengan adanya bantuan permodalan ini petani dapat menambah luas lahan, membeli pupuk yang bagus dan relatif mahal serta dapat mengembangkan hasil pertaniannya yang tentunya dengan menggunakan sumberdaya yang tersedia,

2. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan petani di lingkungannya.

Usaha pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Gapoktan berdampak baik juga terhadap hubungan solidaritas antara pemerintah dengan masyarakat dan antara masyarakat dengan masyarakat. Dengan adanya penyaluran bantuan dari pemerintah melalui Gapoktan sebagai wadah penyalur bantuan tersebut meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat di lingkungannya.

Hidup dalam bermasyarakat menuntut setiap individu maupun masyarakat untuk saling peduli antar sesama masyarakat. Dan terkait dengan kepedulian masyarakat ini khususnya terhadap petani, pemerintah telah berupaya untuk menciptakan kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan petani di Desa Toapaya Selatan melalui pembentukan Kelompok Tani

(Gapoktan). Upaya ini dilakukan pemerintah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah terhadap petani dan menciptakan hubungan yang harmonis antara sesama masyarakat maupun sesama petani. Secara umum gapoktan dibentuk untuk mewedahi seluruh bantuan-bantuan pemerintah yang selanjutnya akan diserahkan kepada petani-petani. Gapoktan juga merupakan sebuah organisasi yang dibentuk untuk memantau perkembangan pertanian yang ada di Desa Toapaya Selatan baik itu dalam melihat keadaan pertanian maupun menanggapi permasalahan yang terjadi. Jadi upaya pemerintah dalam meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan petani terlihat dalam bentuk adanya pembentukan Gapoktan, sebagai upaya memantau dan menjadi wadah bagi petani dalam mengelola pertaniannya.

3. Meningkatkan kemandirian kelompok

Dalam usaha pemerintah dalam memberikan bantuan dengan tujuan memberdayakan ekonomi masyarakat, Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan terkait peran pemerintah sejauh ini adalah memberikan bantuan modal yang diserahkan langsung kepada pengurus Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) di Desa Toapaya Selatan Kabupaten Bintan hal ini adalah upaya pemerintah dalam meningkatkan kemandirian kelompok tani Gapoktan, selain itu bantuan bibit tanaman, pupuk bersubsidi dan beberapa kegiatan pelatihan-pelatihan

untuk meningkatkan potensi petani yang ada di Desa Toapaya Selatan Kabupaten Bintan yang dilakukan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BPPKP). Tujuan adanya BPPKP ini adalah untuk menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Indikator dari pada menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*) dapat dilihat dengan :

1. Mendorong dan Membangkitkan Kesadaran Masyarakat

Dari hasil wawancara dengan informan dan dari pengamatan yang dilakukan dapat diketahui bahwa pemerintah telah berupaya mendorong dan membangkitkan kesadaran masyarakat di Desa Toapaya Selatan Kabupaten Bintan melalui pembinaan maupun penyuluhan tentang pertanian sebagai pendorong motivasi masyarakat untuk bisa maju dan lebih mandiri lagi. Yang mana pembinaan melalui penyuluhan ini dapat dilakukan pada waktu yang telah ditentukan bersama sesuai dengan pengajuan dari kelompok Gapoktan dan nantinya akan dihadiri oleh seluruh kelompok tani. Selain itu juga pemberdayaan masyarakat pada Gabungan kelompok tani sangat berguna untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Serta tersedianya sarana dan prasarana

pendukung seperti pupuk, cangkul dan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk masyarakat tani sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2. Mengembangkan Potensi-Potensi yang telah ada

Sejauh ini pengembangan potensi yang diberikan pemerintah yaitu dengan adanya kebebasan bagi pengurus Gapoktan yang artinya pengurus Gapoktan diberi kebebasan dalam mengembangkan unit jasa ataupun usaha sesuai kebutuhan, seperti unit usahatani, unit usaha pengolahan, unit sarana dan prasarana produksi, unit usaha pemasaran dan unit usaha keuangan mikro/simpan pinjam serta unit jasa penunjang lainnya. pengembangan potensi anggota masyarakat di Desa Toapaya Selatan Kabupaten Bintan lebih banyak dilakukan oleh ketua itu sendiri maupun oleh mereka sebagai anggota. Hal ini tentu saja suatu bentuk pemberdayaan internal melalui perencanaan kerja yang telah dibuat dan dilaksanakan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga harus dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat petani mendapat bimbingan khusus dalam menjalankan kegiatan bertani dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menurut Yansen Parlauangan (2016) kriteria kelompok yang mandiri itu adalah sebagai berikut:

1. Dilihat dari aspek teknis dan manajemen

Kemandirian sebuah kelompok dapat dilihat dari aspek teknis dan manajemen seperti:

- a. Adanya pertemuan/rapat anggota dan pengurus yang diselenggarakan secara berkala dan berkesinambungan minimal 2 kali dalam 1 bulan
- b. Memiliki rencana kerja kelompok sesuai dengan kesepakatan bersama
- c. Melakukan evaluasi perencanaan secara partisipatif, minimal 1 kali pada akhir tahun
- d. Memiliki AD/ART yang disepakati dan ditaati bersama
- e. Memiliki pencatatan/pengadministrasian organisasi yang lengkap (idealnya kelompok memiliki 13 buku administrasi sebagaimana terlampir, buku yang wajib ada :
 - 1). Buku data anggota kelompok,
 - 2) buku tamu kelompok,
 - 3). Buku rencana kegiatan kelompok,
 - 4). Buku inventaris/barang kelompok,
 - 5). Buku daftar hadir pertemuan kelompok,
 - 6). Buku notulen rapat/pertemuan kelompok,
 - 7). Buku khas

- kelompok, 8). Buku pinjaman kelompok
- f. Memiliki papan nama, profil kelompok dan struktur organisasi kelompok
 - g. Pengembangan jejaring kerja kelompok dalam bisnis pertanian.
 - h. Memiliki kegiatan usaha penunjang / diversifikasi / pengolahan dan pemasaran.
 - i. Adanya keberlanjutan pemasaran produksi kelompok dalam satu tahun
 - j. Memiliki fasilitas dan aset (≤ 100 juta untuk Madya, dan ≥ 100 juta untuk Utama) guna mendukung keberlangsungan usaha
 - k. Rata-rata kenaikan tabungan/kas kelompok untuk usaha dalam 1 (satu) tahun sebesar 5-10% untuk Madya dan $\geq 10\%$ untuk Utama
 - l. Kelancaran perputaran / cash flow kas kelompok untuk keberlangsungan usaha anggota/kelompok
 - m. Sebagai sumber pelayanan informasi dan teknologi untuk pengembangan usaha pelaku utama perikanan umumnya dan anggota kelompok khususnya.
 - n. Adanya pemupukan modal usaha baik iuran dari anggota atau penyisihan hasil usaha/kegiatan kelompok.
 - o. Meningkatnya rata-rata produksi kelompok per tahun sebesar 5-10% (Madya) dan $\geq 10\%$ (Utama)
 - p. Meningkatnya rata-rata pendapatan anggota kelompok per tahun sebesar $\geq 10\%$
2. Dilihat dari aspek keuangan Kemandirian sebuah kelompok juga dapat dilihat dari aspek keuangan seperti:
 - a. Memiliki kemampuan mengakses permodalan ke Perbankan dan Lembaga Keuangan lainnya
 - b. Mampu mengembalikan pinjaman modal ke Perbankan dan Lembaga Keuangan lainnya.
 - c. Mampu mengelola simpan pinjam bagi anggota kelompok
 - d. Melakukan pemeriksaan keuangan kelompok minimal 2 kali dalam setahun.
 3. Dilihat dari aspek sosial ekonomi Kemandirian sebuah kelompok juga dapat dilihat dari aspek ekonomi seperti Berperanserta menjaga kelestarian dan kualitas lingkungan (budaya, sosial, ekonomi).

4. Meningkatkan Kapasitas Masyarakat dan Pemerataan Pendapatan

Selain itu Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan masyarakat merupakan salah satu upaya pemberdayaan masyarakat agar dapat meningkatkan kemampuan serta

pengetahuan melalui sosialisasi, pembinaan kepada masyarakat petani, selain itu adanya penyuluh pendamping akan mampu memberikan pengenalan tentang sarana dan prasarana serta produktifitas masyarakat itu sendiri sehingga yang diharapkan adanya pemerataan pendapatan. Dan beberapa hal ini dapat dilihat upaya pemerintah dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan sebagai berikut:

1. Memberikan penyuluhan tentang Pertanian
2. Memberikan pembinaan kepada masyarakat
3. Memberikan pinjaman modal dan sarana prasarana

Sementara itu Perlindungan masyarakat tani pada umumnya dilakukan untuk tetap mempertahankan usaha tani mereka baik dalam kondisi sukses maupun belum berhasil. Hal tersebut bertujuan untuk menumbuh kembangkan kelembagaan petani pada dasarnya dalam peningkatan kemampuan mengembangkan agribisnis serta penguatan Gapoktan menjadi organisasi petani yang kuat dan mandiri di Desa Toapaya Selatan Kabupaten Bintan. Hal ini dapat dilihat melalui indikator berikut ini :

1. Melakukan pemberdayaan untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang.

Pentingnya pemberdayaan kelompok tani di Desa Toapaya Selatan Kabupaten Bintan merupakan salah satu upaya keberhasilan

masyarakat tani khususnya Gabungan Kelompok Tani dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Hanya saja berdasarkan hasil wawancara yang diterima menunjukkan usaha pemerintah dalam memberdayakan usaha tani untuk mencegah adanya persaingan yang seimbang belum terlihat.

2. Membentuk kerjasama dengan lembaga-lembaga dan badan pembinaan

Adanya kerjasama yang dilakukan oleh Gapoktan dengan lembaga dan mitra kerja tujuannya adalah untuk meningkatkan kebutuhan pangan masyarakat tani sehingga usaha mereka ada yang membantu yaitu penyedia sarana dan prasarana produksi, pengolahan dan permodalan.

Terkait penyuluhan pertanian yang diberikan pemerintah, dari informasi yang diterima Proses pelaksanaan penyuluhan dimulai dengan mengirimkan surat permohonan kepada Badan Penyuluhan Kecamatan setempat dan kemudian berdasarkan surat balasan kesediaan penyuluh pertanian aparat pemerintah desa menghubungi para Gapoktan untuk menyiapkan anggotanya dan menyediakan tempatnya.

Jika dilihat Peran pemerintah terhadap Desa Toapaya Selatan Kabupaten Bintan dalam sosialisasi tata cara penanaman sangat kurang dirasakan oleh petani bahkan ada

petani yang sama sekali tidak pernah menerima penyuluhan pertanian dari pemerintah maupun mendapatkan informasi dari RT setempat bahwasannya akan ada penyuluhan. Hal ini menunjukkan juga kurang adanya kerjasama yang baik antara pemerintah desa dengan RT setempat maupun pengurus Gapoktan. Sebaiknya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat bidang pertanian, pemerintah melakukan sosialisasi rutin dan terjadwal sehingga masyarakat petani dapat mengikuti dan menerima informasi terbaru terkait perkembangan pertanian saat ini.

Peran pemerintah terhadap Desa Toapaya Selatan Kabupaten Bintan dalam penyediaan bibit, pupuk belum dapat dilaksanakan dengan baik oleh aparat pemerintah. Terlihat penerimaan terakhir bibit maupun pupuk di Tahun 2014. Selain itu terlihat juga belum adanya bibit maupun pupuk yang disediakan di desa ini baik itu yang bersifat sumbangan pemerintah maupun subsidi. Sehingga sebagian besar masyarakat petani harus membeli bibit, pupuk sendiri dengan harga yang mahal. Hal ini salah satu penyebab perekonomian petani di Desa Toapaya tidak bisa berkembang karena butuh modal yang besar untuk membeli bibit dan pupuk. Masalah lainnya yang menyebabkan perekonomian petani di Desa Toapaya tidak berkembang adalah harga jual hasil pertanian yang rendah dan hasil tanaman terkena hama yang butuh biaya yang besar untuk membeli obat-obatan hama tanaman.

Selain itu kelemahan pemerintah daerah selama ini adalah tidak membantu pemasaran hasil panen petani dan tidak memberikan wadah untuk menjual hasil panen sehingga para petani mencari tempat untuk menjual hasil panennya ataupun menjual kepada langganannya saja. Karena kurangnya peran pemerintah dalam membantu memasarkan hasil panen mengakibatkan harga jual hasil panen petani menurun.

E. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya menunjukkan kurangnya peran Pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Bidang Pertanian pada Desa Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan Tahun 2014 dikarenakan:

1. Hasil panen petani menunjukkan tidak mencukupi bagi masyarakat untuk meningkatkan kebutuhan ekonomi yang pada akhirnya masyarakat lebih memilih bertani sambil bekerja sebagai buruh.
2. Kurangnya kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap petani-petani dan juga tidak meratanya kegiatan penyuluhan tersebut yang mana sebaiknya ada kerjasama yang baik dari pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam mengadakan penyuluhan.
3. Pemerintah tidak membantu petani untuk memasarkan hasil panennya,

sehingga petani harus menjual sendiri hasil panennya dengan harga yang jauh lebih murah

4. Kurangnya bantuan-bantuan pemerintah seperti modal dan peralatan pertanian. Sebagai dampak dari kurangnya bantuan dari pemerintah tersebut adalah terbatasnya lahan pertanian, dan tanaman untuk ditanam. Selain itu juga pendapatan yang selalu mengalami naik dan turun karena para petani harus menyediakan modal sendiri untuk kegiatan pertaniannya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Anwar. 2007. *Manajemen Pemberdayaan Perempuan*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka
- Azam Awang. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintahab Desa*.
- Dunn, William N 2000, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua)*Yogyakarta : Gadja Mada University.
- Edi Suharto. 2005. *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat*. Bandung : PT. Retika Adhitama.
- Harry Hikmat. 2010. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung : Humaniora Utama Press.
- Isbandi Rukminto Adi. 2013. *Intervensi Komunitas & Pengembangan Masyarakat sebagai upaya pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Jim Ife dan Frank Tesoriere. 2008. *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi: Community Development*. Sastrawan Manulang dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Meleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi S. Ed. 2006. “*Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*”.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta Rineka Cipta.
- Sarwono. Jonathan 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta

- Sumodiningrat,
 Gunawan.2003.*Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*.Jakarta: Gramedia.
- Tambunan, Tulus. 2003. *Perkembangan Sektor Pertanian di Indonesia, Beberapa Isu Penting*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Usman, Husaini. Akbar, dan Purnomo Setiady. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung : Bumi Aksara
- Zubaedi . 2013 . *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Peraturanperundang-undangan**
- Undang-UndangNomor 32 tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah
- Undang-UndangNomor 6 tahun 2014 tentangPemerintahanDesa
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 273/Kpts/Ot.160/4/2007 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Tani dan Gabungan KelompokTani
- Peraturan Mentri Pertanian Nomor: 82/Permentan/OT.140/8.2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Kelompok Tani
- Dokumen**
- Profil Desa Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan Tahun 2014
- Programa Penyuluh Pertanian Tahun 2015. BPK Kec.Gunung Kijang dan Toapaya Kabupaten Bintan